Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur

Ferry Prasetyia

- Email: ferry.p@ub.ac.id
- Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Riwayat artikel:

- Diterima 12 Agustus 2020
- Direvisi 23 September 2020
- Disetujui 3 Oktober 2020
- Tersedia online 12 Agustus 2021

Abstract

The phenomenon of rapid economic growth and increasing income inequality needs a new paradigm in policymaking that promotes inclusive growth. The change in development paradigm requires a good quality of government. Therefore, this study, using panel data regression analysis, aims to analyze the effect of the local government quality on inclusive growth in all districts/cities in East Java Province. Fiscal conditions and regional financial performance measure the quality of government. Meanwhile, the BAPPENAS inclusive development index measures inclusive growth. The estimation results show that the fiscal conditions and regional financial performance have a significant and positive effect on inclusive economic growth in the regions.

Keywords:

Local Government quality; Inclusive Growth; and East Java

JEL Classification :

H30; H72; R11; O47

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Jawa Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) mencatat bahwa Jawa Timur merupakan kontributor kedua terbesar setelah DKI Jakarta dalam pembentukan aktivitas ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 15 persen terhadap total PDB nasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengikuti pola pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur telah menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pendapatan per kapita Jawa Timur relatif berada di bawah nasional dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut diperparah oleh tingkat kemiskinan di Jawa Timur yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional (10,85 persen Jawa Timur dan nasional sebesar 9,66 persen tahun 2018) (Badan Pusat Statistik RI, 2019). Selain itu, ketimpangan pendapatan Jawa Timur pada tahun 2018 cukup tinggi, yaitu sebesar 0,38 (Badan Pusat Statistik RI, 2019).

Peningkatan ketimpangan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Fenomena tersebut memerlukan sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mengambil arah baru kebijakan yang bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga menekan angka kemiskinan dan ketimpangan. Konsep tersebut dikenal dengan nama pertumbuhan ekonomi inklusif. Klasen (2010), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang tiga pilar utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; (2) perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan tersebut; dan (3) keberadaan jaring pengaman sosial sebagai pencegahan kerugian ekstrim. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata.

Beberapa penelitian telah menunjukkan manfaat dari pertumbuhan inklusif tersebut. Pada negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif, Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat dan diiringi dengan penurunan rasio gini (Aoyagi & Ganelli, 2015). Selanjutnya jika pertumbuhan inklusif tersebut diiringi dengan pertumbuhan di sektor industri maka akan memberi pengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan di negara tersebut (Lee & Sissons, 2016). Fenomena di Indonesia juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif akan mampu mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan lapangan pekerjaan, meskipun dampak tersebut lebih sering terjadi di wilayah Indonesia bagian barat (Amalina, 2013).

Penelitian Liu et al., (2018) membuktikan bahwa kualitas pemerintahan yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan pemerintah memiliki kekuatan untuk menerapkan peraturan yang bersifat *pro-poor* dan melindungi masyarakat dari monopoli kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Lebih lanjut, terdapat pula penelitian yang menunjukkan dampak positif dari pemerintahan yang berkualitas terhadap pertumbuhan ekonomi (Holmberg & Rothstein, 2010; Jindra & Vaz, 2019; Samarasinghe, 2018). Kualitas pemerintahan tersebut diukur melalui beberapa hal, diantaranya perilaku korupsi, stabilitas politik, akuntabilitas, kebebasan berpendapat, serta aspek keamanan masyarakat.

Meskipun telah terbukti mempercepat pertumbuhan ekonomi, saat ini masih jarang ditemukan penelitian yang menunjukkan dampak kualitas pemerintahan yang baik terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Inklusif. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

inklusif, khususnya di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel 38 kabupaten kota di Jawa Timur dan analisis regresi panel. Struktur paper ini dimulai dengan pendahuluan dan diikuti dengan tinjauan pustaka serta metode penelitian. Setelah itu, disajikan hasil penelitian dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi inklusif erat kaitannya dengan pertumbuhan *pro-poor* dimana keduanya bermaksud menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan inklusif memiliki dimensi yang berbeda dalam hal kesetaraan pendapatan (Ranieri & Ramos, 2013). *Pro-poor* lebih berfokus pada orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan pertumbuhan inklusif berfokus pada penyetaraan di semua lapisan masyarakat, baik miskin, menengah, dan kaya. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan yang hanya berpihak pada kaum miskin akan berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi (Klasen, 2010). Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengutamakan kesetaraan antar tingkat masyarakat guna memperluas peluang ekonomi baru (McKinley, 2010).

Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam teori-teori pertumbuhan (Huang & Quibria, 2013). Hal tersebut sesuai dengan definisi UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua pihak. Singh (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif bukan hanya mengejar tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pendekatan Bank Dunia mengenai pertumbuhan inklusif juga menekankan pada pemerataan. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi memang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, agar pertumbuhan tersebut bersifat berkelanjutan dalam jangka panjang, harus terdapat pemerataan di seluruh sektor. Perspektif jangka panjang tersebut menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana inklusivitas mengacu pada kesetaraan peluang dalam hal akses ke pasar, sumber daya, dan lingkungan peraturan yang tidak memihak individu (Durand, 2015). Ruang lingkup pertumbuhan ekonomi inklusif lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi *pro-poor* yang telah digunakan sebagai kebijakan pembangunan di beberapa negara berkembang (Ali & Son, 2007). Pada dasarnya terdapat tiga aspek utama yang diperhatikan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan partisipasi kerja. Sementara itu, Anand et al. (2013) menyatakan dalam kajiannya bahwa ada dua dimensi pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

Konsep pertumbuhan inklusif berawal dari fakta bahwa pertumbuhan ekonomi negara Asia yang tinggi justru diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan (Klasen, 2010). Fenomena tersebut terjadi di negara-negara berkembang di Asia pada tahun 1960-an yang menegaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Akibat dari ketimpangan tersebut adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya bertentangan dari tujuan awal pembangunan ekonomi negara. Pada periode waktu tersebut, negara-negara berkembang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun gagal menekan angka ketimpangan (Todaro & Smith, 2011). Kondisi ini mengubah pandangan ekonomi tradisional yang mempercayai bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Gambar 1. Kurva U-Terbalik Kuznets

Sumber: Todaro & Smith (2011)

Hipotesis Kuznet, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1, memperkuat pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif. Kurva Kuznet menunjukkan hubungan positif antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan tersebut akan berubah menjadi negatif seiring dengan terus tumbuhnya ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Sebagaimana dijelaskan oleh Kuznet, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi akan sulit dinikmati oleh masyarakat miskin, yang dibuktikan dengan hubungan positif antara peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dengan koefisien gininya. Setelah melewati titik puncaknya, ketimpangan pendapatan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita (Ali, 2007; Bourguignon, 2012; Lee & Sissons, 2016; Singh, 2017; Son & Kakwani, 2004). Tingginya pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai perbaikan distribusi pendapatan menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa menikmati manfaat pertumbuhan tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu strategi pembangunan yang mempercepat tercapainya titik puncak tersebut. Dapat dikatakan bahwa kurva Kuznet menggambarkan perubahan struktur ekonomi negara dari tradisional menuju ekonomi modern.

Di sisi lain, mazhab klasik meyakini konsep *trickle-down* yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Konsep tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan dinikmati oleh suatu kelompok hingga di titik tertentu dimana pertumbuhan yang terjadi tidak lagi mampu ditampung oleh kelompok tersebut. Kelebihan dari pertumbuhan tersebut akan menetes ke bawah dan dinikmati oleh kelompok lainnya. Namun demikian, fakta yang terjadi adalah sebaliknya, dimana kapasitas kelompok pertama yang menikmati pertumbuhan tersebut juga menjadi semakin besar. Akibatnya, tidak terjadi tetesan pertumbuhan ekonomi pada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Menurut Azwar (2016) fenomena tersebut dikarenakan pertumbuhan yang terjadi hanya disumbang oleh sekelompok kecil masyarakat saja. Jika hal tersebut terjadi, masyarakat miskin akan semakin tersisihkan karena kecilnya kontribusi mereka terhadap aktivitas ekonomi. Pada gilirannya, ketimpangan pendapatan akan semakin melebar karena masyarakat yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

Upaya menekan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi seharusnya saling menguntungkan. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin pada dasarnya akan meningkatkan kualitas SDM. Hal tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga serta kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan rangsangan permintaan barang dan jasa. Hubungan antara pertumbuhan inklusif dan tenaga kerja tersebut juga dikemukakan oleh World Bank (2009). Pertumbuhan yang inklusif akan tercapai melalui pertumbuhan industri padat karya dan perbaikan kualitas tenaga kerja. Kedua hal tersebut akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong terjadinya kondisi *full employment* (Felipe, 2012).

Dalam penelitian terdahulu, pertumbuhan inklusif juga membahas permintaan domestik, persamaan modal sosial, dan tenaga terlatih atau tidak terlatih berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan inklusif. Penelitian Zheng & Shen (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan inklusif yang didorong oleh permintaan domestik akan meningkatkan elastisitas pasar tenaga kerja dan keterampilan struktur tenaga kerja. Efek dari pendapatan per kapita juga meningkatkan pasar tenaga kerja dan memberikan efek promosi kepada pertumbuhan inklusif internasional. Hasil positif juga dibuktikan dalam penelitian Dinda (2014) serta Qiu & Zhao (2019) bahwa tingkat pertumbuhan, rasio gini, lama sekolah, dan aturan hukum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif terutama di negara maju. Qiu membuktikan bahwa kesenjangan pendapatan, rasio wilayah, kepadatan, upah, dan skill berpengaruh positif bagi pekerja migran terhadap inklusivitas perkotaan di China. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Lee & Sissons (2016) bahwa tenaga kerja terlatih tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif di Inggris.

Beberapa peneliti mencoba menggabungkan konsep SDGs untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Penelitian van Niekerk (2018) yang dilakukan di Afrika menunjukkan dengan studi literatur dan menerapkan konsep MDGs menuju SDGs berpeluang mencapai pertumbuhan inklusif. Dalam mencapai konsep SDGs, penelitian Oluwadamilola et al., (2018) di Nigeria mengatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian yang dilakukan Whajah et al., (2019) di 54 negara di Afrika mengenai pertumbuhan inklusif didapatkan bahwa *government size*, inflasi, produktivitas tenaga kerja, modal tetap bruto, pertumbuhan populasi, dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif sedangkan tingkat hutang publik memiliki efek yang negatif.

Terdapat beberapa penelitian di Indonesia yang mencoba mengimplementasikan pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut Amalina (2013) masih belum inklusif. Dengan menggunakan konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate*, hasil penelitian menunjukkan fenomena pertumbuhan inklusif dalam mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan lapangan kerja lebih banyak terjadi pada Indonesia Bagian Barat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kusumaningrum & Yuhan (2019) dengan menggunakan metode indeks komposit. Kajian tersebut menunjukkan hasil bahwa belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki kategori pertumbuhan inklusif yang unggul. Sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai kategori memuaskan dan masih terdapat dua provinsi dalam kategori tidak memuaskan.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi & Ismal (2017) mengenai kebijakan fiskal dan sasaran akhir kebijakan moneter di empat negara OKI menunjukkan hasil bahwa pengeluaran kesehatan secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di sisi lain, pengeluaran pendidikan secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Arab Saudi. Inflasi hanya signifikan dalam jangka panjang, sedangkan kredit domestik secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif di Arab Saudi, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang.

Hubungan antara kualitas pemerintah dan penurunan kemiskinan ditunjukkan dalam penelitian Holmberg & Rothstein (2010). Bukti empiris dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan akan memiliki dampak yang positif namun sedikit berbeda pada negara miskin dan negara kaya. Pada negara-negara miskin, kualitas pemerintahan yang baik akan membantu menurunkan kemiskinan absolut. Sementara itu, pada negara-negara kaya, kualitas pemerintahan yang baik akan membantu menurunkan tingkat ketimpangan. Lebih lanjut kualitas pemerintahan tersebut tidak dipengaruhi apakah pemerintahan negara tersebut bersifat demokratis ataupun otoriter.

Penelitian Jindra & Vaz (2019) menunjukkan adanya dampak langsung pemerintahan yang baik terhadap penurunan kemiskinan yang bersifat multidimensional. Lebih lanjut,

kualitas pemerintahan yang baik juga akan mengurangi ketimpangan pendapatan yang bersifat horizontal. Namun demikian, penelitian Jindra dan Vaz menunjukkan bahwa dampak positif dari pemerintahan yang berkualitas hanya terjadi pada negara-negara dengan pendapatan menengah saja namun tidak pada negara miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan yang baik saja tidak cukup untuk menurunkan kemiskinan. Disamping itu, reformasi birokrasi belum tentu memberikan dampak positif bagi semua negara yang menjalaninya. Selanjutnya, penelitian Liu et al. (2018) membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkualitas memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional China. Kualitas tata kelola yang lebih tinggi dapat membawa efek pertumbuhan ekonomi berkecepatan tinggi di wilayah barat, sementara kualitas tata kelola yang lebih tinggi dapat membawa efek perkembangan ekonomi berkualitas tinggi di wilayah timur. Dibandingkan dengan investasi aset tetap, modal manusia memainkan peran yang lebih penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi China yang berkelanjutan, pembuat kebijakan harus meningkatkan kualitas tata kelola lokal, memperkuat kapasitas inovasi independen, dan mempromosikan akumulasi sumber daya manusia berkualitas tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti WorldBank, BAPPENAS, dan BPS. Secara rinci, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana tertera pada tabel 1.

Tabel 1: Data dan Sumber Data

No.	Kebutuhan Data	Tahun	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	2014 – 2018	BAPPENAS
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPEI)	2014 – 2018	BPS
3	Derajat Desentralisasi Fiskal (DF)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu
4	Derajat Kemandirian Fiskal (DKF)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
5	Rasio Belanja Modal (RBM)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
6	Hasil Laporan Audit BPK (BPK)	2014 – 2018	World Bank IndoDAPOER
7	Return on Asset Daerah (ROA)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
8	Quick Ratio Daerah (QR)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
9	Debt to Asset Ratio Daerah (DTA)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
10	Debt to Equity Ratio Daerah (DTE)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
11	Cash Ratio Daerah (CR)	2014 – 2018	DJPK Kemenkeu, Diolah
12	PDRB Per Kapita (Pkap)	2014 – 2018	BPS, Diolah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2014 – 2018	BPS, Diolah
14	Kepadatan Penduduk (DEN)	2014 – 2018	BPS, Diolah

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan data panel yang merupakan penggabungan antara data *timeseries* dan *cross section*. Terdapat beberapa model regresi dalam data panel, yaitu *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam proses analisis digunakan pengujian model melalui Uji Chow, Hausman, dan LM. Secara umum, model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Terdapat empat belas variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kelompok variabel yang masing-masing menggambarkan kondisi fiskal daerah, kualitas laporan keuangan daerah, dan variabel kontrol.

Tabel 2: Deskripsi Variabel

No	Var	Kelompok	Keterangan
1	IPEI	-	IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI diukur dalam tiga kelompok. <ul style="list-style-type: none"> • Skala 1-3 kurang memuaskan • Skala 4-7 memuaskan • Skala 8-10 sangat memuaskan
2	IPM	-	IPM menjelaskan kualitas penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu Angka Harapan Hidup, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak
3	DF	Kualitas Fiskal Daerah	Ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah,
4	DKF		Ketergantungan fiskal daerah yang dihitung dari dana perimbangan per total pendapatan daerah
5	RBM		Proporsi total belanja modal terhadap total belanja daerah
6	BPK	Kinerja Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan dalam bentuk skala 1-5, dimana skala 1 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 5 menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
7	ROA		Ukuran profitabilitas daerah yang diperoleh dari rasio pendapatan terhadap total aset
8	QR		Ukuran likuiditas daerah yang diperoleh dari rasio persediaan terhadap kewajiban lancar
9	DTA		Ukuran solvabilitas daerah yang diperoleh dari rasio total utang terhadap total aset
10	DTE		Ukuran solvabilitas daerah yang diperoleh dari rasio total utang terhadap modal
11	CR		Ukuran likuiditas daerah yang diperoleh dari rasio kas terhadap utang lancar
12	PDRBKap	Kontrol	Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah, yang diperoleh dari rasio PDRB terhadap jumlah penduduk
13	TPT		Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
14	DEN		Persentase jumlah penduduk per luas wilayah

Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, disusun model analisis untuk mengetahui hubungan antara kualitas pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi inklusif. Dalam penelitian ini terdapat dua model analisis. Model pertama menggunakan nilai IPEI untuk mengukur pembangunan ekonomi inklusif. IPEI ini bersumber dari Bappenas yang mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses, dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks. Selanjutnya model kedua menggunakan IPM untuk mengukur pembangunan ekonomi inklusif. Model kedua tersebut berfungsi sebagai pembanding bagi model pertama untuk memperoleh model analisis yang terbaik. Penggunaan IPM sebagai ukuran inklusivitas tersebut sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Ejemeyovwi & Osabuohien (2018) dan Huang & Quibria (2013).

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga poin utama yang dapat dilihat mengenai kondisi kualitas pemerintah dan pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Pertama, yaitu kondisi pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kab. Sampang memiliki nilai IPEI terendah sebesar 4.51 pada tahun 2018. Di sisi lain, Kota Madiun memiliki nilai IPEI tertinggi, yaitu 6.72 pada tahun 2018. Rata-rata nilai IPEI seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 5,4. Jika merujuk pada skala yang ditetapkan oleh BAPPENAS, dapat dikatakan bahwa kondisi pembangunan ekonomi Inklusif di Jawa Timur sudah cukup memuaskan. Di sisi lain, apabila dilihat dari nilai IPM-nya, nilai IPM terendah sebesar 56.9 pada Kab. Sampang tahun 2014 sementara nilai tertinggi sebesar 81.07 merupakan IPM Kota Surabaya pada tahun 2017. Rata-rata IPM pada 38 Kab/Kota Jatim pada periode 2014-2018 adalah 69.7. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur masih kurang merata selama periode tahun 2014 hingga 2018, meskipun terjadi peningkatan pada nilai IPM di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 3: Gambaran Umum Kondisi Kualitas Pemerintahan Daerah Jawa Timur

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ipei	190	5.465947	0.4485012	4.51	6.72
ipm	190	69.78679	4.95177	56.98	81.07
Kondisi Fiskal Daerah					
df	190	14.47211	8.312308	5.76	56.71
dkf	190	49.35889	10.24393	14.82	83.72
rbm	190	0.1940554	0.0480443	0.0900483	0.3681764
Kinerja Laporan Keuangan Daerah					
auditbpk	190	1.689474	1.318727	1	5
roa	190	0.5717202	0.1960726	0.1505393	1.043338
car	190	33785.02	409104.7	0.01	5588497
qr	190	5.569947	21.55939	0.02	267.81
dta	190	0.0073379	0.0089209	0.0000471	0.0604011
dte	190	0.0074758	0.0093633	0.0000471	0.064284
Variabel Kontrol					
pdrbkap	190	3.64E+07	4.49E+07	1.08E+07	2.97E+08
tpt	190	3.226105	2.099224	0	8.46
density	190	1892.767	2138.513	272.0663	8292.836

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Kedua, kapasitas fiskal daerah dapat dilihat dari variabel derajat desentralisasi fiskal (df) maupun derajat ketergantungan fiskal daerah (dkf). Desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Zukhri, 2020). Nilai df terendah sebesar 5.76 dimiliki oleh Kab. Pamekasan pada tahun 2014 sementara nilai tertinggi sebesar 56.71 dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2017. Rata-rata derajat

desentralisasi fiskal di Kab/Kota di Jawa Timur adalah 14.4. Di sisi lain, ketergantungan fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Nilai ketergantungan terendah dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 14.82, sedangkan ketergantungan tertinggi dimiliki oleh Kab. Probolinggo pada tahun 2018 sebesar 83.72. Ketiga, kualitas laporan keuangan daerah. Pada dasarnya, kondisi laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator sebagaimana tercantum pada tabel 3 di atas. Namun demikian, secara sederhana kondisi laporan keuangan dapat dilihat dari audit BPK dan rasio utang (dta & dte).

Selanjutnya, dilakukan regresi pada variabel independen yang telah dijelaskan sebelumnya untuk melihat pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Ukuran pertumbuhan ekonomi inklusif dalam model pertama menggunakan IPEI, sedangkan pada model kedua menggunakan IPM. Selanjutnya, dilakukan kombinasi variabel-variabel independen pada kedua model tersebut sehingga terbentuklah empat model analisis yang terbaik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4: Hasil Analisis Data

VARIABLES	IPEI		IPM	
	1	2	1	2
Kondisi Fiskal Daerah				
df	0.0137*** (0.00346)		0.139** (0.0546)	
dkf		-0.00685*** (0.00189)		-0.0743** (0.0365)
rbm	-0.506* (0.268)	-0.359 (0.285)	-7.453 (4.790)	-6.056 (5.190)
Kinerja Laporan Keuangan Daerah				
auditbpbk	-0.0329*** (0.00802)	-0.0318*** (0.0102)	-0.316** (0.145)	-0.285 (0.177)
roa	-0.218** (0.0828)	-0.372*** (0.0839)	-0.842 (1.619)	-2.340 (1.568)
cr	9.77e-09*** (2.34e-09)	1.29e-08*** (3.31e-09)	1.22e-07 (7.66e-08)	1.41e-07 (9.15e-08)
dta	0.485 (1.502)	0.621 (1.527)	5.600 (34.00)	8.424 (34.33)
Variabel Kontrol				
pdrbkap	0.0851*** (0.0212)	0.0823*** (0.0220)	-0.226 (0.447)	-0.253 (0.482)
tpt	0.000239 (0.00406)	0.00134 (0.00361)	0.0271 (0.0558)	0.0416 (0.0604)
density	0.000174** (8.20e-05)	0.000180** (7.43e-05)	0.00127*** (0.000242)	0.00139*** (0.000242)
Constant	3.786*** (0.417)	4.410*** (0.465)	71.49*** (8.080)	77.86*** (9.112)
Observations	190	190	190	190
R-squared	0.503	0.522	0.5041	0.5199
Number of id	38	38	38	38
Hausman test				
IPE Prob>chi2 =	0.0000 (Fixed Effect)			
IPM Prob>chi2 =	0.1006 (random effect);			
LM Test				
IPM Prob>chibar2 =	0.000 (random effect)			

Standar error dalam tanda kurung (); level signifikan: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Secara umum, dapat dikatakan bahwa model IPEI lebih baik daripada model IPM. Hal tersebut dikarenakan model IPEI menunjukkan hasil yang lebih stabil pada kombinasi variabel-variabelnya. Sementara itu, model IPM secara umum menunjukkan hasil yang kurang stabil. Selanjutnya, berdasarkan uji yang telah dilakukan (Hausman dan LM Test) diketahui bahwa model terbaik untuk IPEI adalah dengan menggunakan *Fixed Effect*, sementara untuk model IPM menggunakan *Random Effect*. Variabel *df* dan *dkf* memiliki tingkat signifikansi yang cukup tinggi, yaitu kurang dari 5%, baik pada model IPEI dan IPM. Dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut cukup stabil. Variabel *df* memiliki koefisien positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi inklusifnya juga cenderung meningkat. Di sisi lain, variabel *dkf* memiliki koefisien negatif yang dapat diartikan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah tersebut.

Pada kelompok variabel kinerja keuangan daerah, empat variabel memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, namun hanya stabil pada model IPEI. Di lain pihak, model IPM tidak cukup stabil. Variabel *Auditbpk*, *roA*, dan *rbm* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini berarti bahwa semakin kecil nilai variabel-variabel tersebut maka pertumbuhan ekonomi inklusif daerah tersebut cenderung semakin tinggi. Di sisi lain, variabel *cr* berpengaruh positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *cash ratio* daerah maka akan cenderung semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi inklusif daerah tersebut. Adapun pada kelompok variabel kontrol, jumlah PDRB per kapita dan kepadatan penduduk memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel *pdrb* per kapita hanya berdampak signifikan pada model IPEI namun tidak signifikan pada variabel IPM. Di sisi lain, kepadatan penduduk bernilai signifikan baik pada model IPEI maupun IPM. Kedua variabel tersebut memiliki nilai positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai *pdrb* per kapita dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah maka tingkat pembangunan inklusifnya juga akan cenderung meningkat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian daerah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif daerah. Hal tersebut sejalan dengan temuan (Bahl & Wallace, 2006) dan (Nurhemi & Suryani, 2015). Kemandirian yang tinggi akan membuat daerah mampu mengalokasikan belanjanya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Nurhemi & Suryani, 2015) dan kualitas hidup masyarakat (McKay, 2002; Mosley et al., 2004; Stefano et al., 2005). Pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan ciri utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemandirian daerah pada dasarnya dapat ditingkatkan dengan menambah sumber pembiayaan melalui pinjaman, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri (Hamid, 2003). Namun demikian, saat ini banyak daerah yang belum memanfaatkan pinjaman sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah (Santoso, 2003). Padahal hal tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti PP No. 54/2005, PP No. 30/2011, serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dari sisi kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi kualitas atau performa keuangan daerah, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel *Auditbpk*, yang menunjukkan opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK merupakan pernyataan BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini tersebut disajikan dalam skala 1-5, dimana semakin kecil nilai opini tersebut berarti semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan. Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Di samping itu, kondisi laporan keuangan daerah juga dapat dilihat dari *cash ratio* yang merupakan indikator likuiditas keuangan. Pada dasarnya, likuiditas keuangan dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dalam membiayai utang-utang jangka pendeknya. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi likuiditas keuangan daerah maka semakin besar peluang terjadinya pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Grobéty (2018) yang menunjukkan bahwa likuiditas keuangan pemerintah yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor industri. Jika dikaitkan dengan kemandirian daerah, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, likuiditas yang baik merupakan indikator kemandirian fiskal yang baik pula.

Selanjutnya, belanja modal pemerintah yang diwakili oleh variabel *rbm* menunjukkan hubungan negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah maka kecenderungan pertumbuhan ekonomi inklusif akan semakin kecil. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur masih bersifat eksklusif, sebagaimana penelitian Sita (2017) yang menemukan fenomena serupa di wilayah Kalimantan. Hubungan negatif tersebut diduga diakibatkan kurang tepatnya pengelolaan belanja modal yang dilakukan sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan justru menghambatnya (Fajri, 2016). Padahal pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak diabaikan dalam konsep pertumbuhan inklusif. Tidak mengherankan apabila dampak belanja modal justru mengurangi pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Sementara itu, variabel *roa* menunjukkan profitabilitas. Dalam sistem keuangan perusahaan, *roa* yang tinggi menunjukkan hal yang positif. Hal ini berarti perusahaan dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan publik, *roa* yang tinggi justru menunjukkan kondisi *financial distress* (Sutaryo & Doddy, 2010; Wulandari et al., 2018). Perlu diingat bahwasanya sistem penilaian anggaran pemerintah berbeda dengan penilaian anggaran perusahaan, di mana pemerintah dinilai dari keberhasilannya menyerap anggaran, bukan keberhasilannya menghasilkan laba. Dilihat secara ekonomis, surplus anggaran memang baik, namun jika dilihat dari efektifitas dan efisiensi, yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi *RoA* yang tinggi dapat diartikan bahwa banyak program pemerintah yang tidak dapat tereksekusi dengan baik sehingga anggarannya tidak terserap maksimal. Padahal, anggaran-anggaran yang tidak terserap dengan baik tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik, misalnya pada sektor kesehatan atau pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan pertumbuhan inklusif secara umum.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita wilayah berarti semakin makmur pula daerah tersebut. Dampak positif PDRB per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sejalan dengan penelitian Aoyagi & Ganelli (2015); Sabir & Qamar (2019) Zheng & Shen (2019). PDRB per kapita yang tinggi berarti menggambarkan daya beli masyarakat yang tinggi pula. Masyarakat akan mampu hidup dengan lebih layak dan memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas SDM melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta gizi. Pada gilirannya, hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, intervensi pemerintah tetap diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tersebut dinikmati oleh semua pihak dan tidak meningkatkan ketimpangan. Sementara itu, variabel kepadatan penduduk dapat dimaknai sebagai ketersediaan tenaga kerja. SDM yang berkualitas berpotensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui konsumsi maupun sebagai tenaga kerja Whajah et al. (2019). Banyaknya jumlah penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan layanan masyarakat, utamanya pendidikan dan kesehatan dasar. Hal tersebut harus dapat dipenuhi oleh pemerintah agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kualitas pemerintahan daerah yang diindikasikan oleh kondisi fiskal dan kinerja laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif daerah. Kondisi fiskal daerah yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kemandirian fiskal menjadi salah satu aspek penting dan menentukan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, pengelolaan belanja daerah khususnya belanja modal perlu ditingkatkan untuk pembangunan. Dari sisi kinerja laporan keuangan, hasil audit BPK, Return on Asset, dan Cash Ratio merupakan faktor yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Rekomendasi kebijakan terkait hasil penemuan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah perlu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal, khususnya Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi secara terpadu dapat dilakukan. Pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah bisa juga menjadi alternatif dalam penerimaan daerah. Selain itu, pengelolaan dan peningkatan belanja modal untuk pembangunan daerah perlu dilakukan. Kedua, diperlukan indikator kualitas pemerintahan yang tepat, khususnya di aspek-aspek non ekonomi, seperti keterbukaan, tingkat korupsi, tingkat kebebasan berpendapat dan lain sebagainya untuk dapat mengukur tingkat kualitas pemerintahan yang ada.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak, terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Alya Mufida, Girindra M. Paksi yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, baik dalam dukungan pendanaan, substansi maupun pada aspek yang lainnya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. (2007). Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asia. *Asian Development Review*, Vol. 24 (2), pp. 1-16.
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11.
- Amalina, D. H. (2013). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85-112.
- Anand, R., Mishra, M. S., & Peiris, S. J. (2013). Inclusive growth: Measurement and determinants (Issues 13-135). *International Monetary Fund*.
- Aoyagi, C., & Ganelli, G. (2015). Asia's quest for inclusive growth revisited. *Journal of Asian Economics*, 40, 29-46.
- Azwar, A. (2016). PERTUMBUHAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 9(2), 216-242.
- Badan Pusat Statistik RI. (2019). *Statistik Indonesia 2019*.
- Bahl, R., & Wallace, S. (2006). Fiscal decentralization and fiscal equalization within regions: The case of Russia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 18(1), 27.
- Bourguignon, F. (2012). Commodity price volatility, poverty, and growth inclusiveness in sub-Saharan African countries. *Commodity Price Volatility and Inclusive Growth in Low-Income Countries*, Washington, DC: International Monetary Fund, 205-222.
- Dinda, S. (2014). Inclusive growth through creation of human and social capital. *International Journal of Social Economics*.
- Durand, M. (2015). The OECD better life initiative: How's life? And the measurement of well-being. *Review of Income and Wealth*, 61(1), 4-17.
- Ejemeyovwi, J. O., & Osabuohien, E. S. (2018). Investigating the relevance of mobile technology adoption on inclusive growth in West Africa. *Contemporary Social Science*.

- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Felipe, J. (2012). *Inclusive Growth, Full Employment, and Structural Change: Implications and Policies for Developing Asia*. Anthem Press.
- Grobéty, M. (2018). Government debt and growth: The role of liquidity. *Journal of International Money and Finance*, 83, 1–22.
- Hamid, E. S. (2003). Prospek Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan. *Sinergi: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, 6(1).
- Holmberg, S., & Rothstein, B. (2010). Quality of Government is Needed to Reduce Poverty and Economic Inequality. The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg.
- Huang, Y., & Quibria, M. (2013). The global partnership for inclusive growth (No. 9292306367). WIDER Working Paper.
- Jindra, C., & Vaz, A. (2019). Good governance and multidimensional poverty: A comparative analysis of 71 countries. *Governance*, 32(4), 657–675.
- Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya [Economic Growth of Provinces in Indonesia Based on Inclusive Growth Composite Index and The Influence Factors]. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17.
- Lee, N., & Sissons, P. (2016). Inclusive growth? The relationship between economic growth and poverty in British cities. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 48(11), 2317–2339.
- Liu, J., Tang, J., Zhou, B., & Liang, Z. (2018). The Effect of Governance Quality on Economic Growth: Based on China's Provincial Panel Data. *Economics*, 6(4), 56–79.
- McKay, A. (2002). Assessing the impact of fiscal policy on poverty (Issue 2002/43). WIDER Discussion Paper.
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress.
- Mosley, P., Hudson, J., & Verschoor, A. (2004). Aid, poverty reduction and the 'new conditionality.' *The Economic Journal*, 114(496), F217–F243.
- Nurhemi, N., & Suryani, G. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(2), 183–206.
- Oluwadamilola, O., Akinyemi, O., & Adediran, O. (2018). Human capital development and inclusive growth: Implications for achieving SDG-4 in Nigeria. *African Population Studies*, 32(1), 4088–4096.
- Pratiwi, I. E., & Ismal, R. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Sasaran Akhir Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 4(1), 73–91.
- Qiu, L., & Zhao, D. (2019). Urban inclusiveness and income inequality in China. *Regional Science and Urban Economics*, 74, 57–64.
- Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). After all, what is inclusive growth. International Policy Centre for Inclusive Growth (Online Document).
- Sabir, S., & Qamar. (2019). Fiscal policy, institutions and inclusive growth: Evidence from the developing Asian countries. *International Journal of Social Economics*, 46(6), 822–837.
- Samarasinghe, T. (2018). Impact of governance on economic growth.
- Santoso, R. P. (2003). Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Daerah Istimewa Jogjakarta. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(2).
- Singh, K. D. (2017). Inclusive Growth and Poverty Reduction: A Case Study of India. *Indian Journal of Public Administration*, 63(4), 579–594.
- Sita, P. R. A. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 2(2), 180–198.
- Son, H. H., & Kakwani, N. (2004). Economic growth and poverty reduction: Initial conditions matter.

- Stefano, P., Anand, R., & Tiongson Erwin, R. (2005). How Does the Composition of Public Expenditure Matter. World Bank Policy Research Working Paper, 3555.
- Sutaryo, S. B., & Doddy, S. (2010). Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. SNA XIII, Purwokerto.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic Development II. Addison-Wesley.
- van Niekerk, A. J. (2018). Economic inclusivity: Africa's MDG progress and lessons for SDGs. African Journal of Economic and Management Studies.
- Whajah, J., Bokpin, G., & Kuttu, S. (2019). Government size, public debt and inclusive growth in Africa. *Research in International Business and Finance*, 49, 225–240.
- World Bank. (2009). World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography (Vol. 2). World Bank.
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100–105.
- Zheng, J., & Shen, C. (2019). Domestic demand-based economic globalization and inclusive growth. *China Political Economy*.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.